



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MISBARDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 190078

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.065.040.000

1. Tanah Seluas 570 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000

2. Tanah Seluas 2000 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

3. Tanah Seluas 446 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 861.500.000

4. Tanah Seluas 6300 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000

5. Tanah Seluas 17866 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN RIAU, HASIL SENDIRI Rp. 267.990.000

6. Tanah Seluas 900 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

7. Tanah Seluas 5540 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 83.100.000

8. Tanah Seluas 600 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

9. Tanah Seluas 1800 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000



10. Tanah Seluas 19730 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG
, HASIL SENDIRI Rp. 295.950.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	146.325.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.611.368
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.237.976.368
III. HUTANG	Rp.	407.553.577
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.830.422.791

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.